

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

# NOMOR : 180.192/007/KEP/2001/2016

# TENTANG

PENGANGKATAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA WONOGIRI

TAHUN 2016

## KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa dalam melaksanakan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu diangkat Tim Penyusun RKPDesa; |
|  |  | b. | Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; |
|  |  | 9. | PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; |
|  |  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; |
|  |  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016tentangPerubahankedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|  |  | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 13. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; |
|  |  | 14. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
|  |  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
|  |  | 16. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; |
|  |  | 17. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; |
|  |  | 18. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan; |
|  |  | 19. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; |
|  |  | 20. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019. |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN |
|  |
|  |  |  |  |
| Menetapkan | : |  |  |
|  |  |  |  |
| PERTAMA | : | Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Rencana Kerja PemerintahanDesa. |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Tim Rencana Kerja Pemerintahan Desa dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas : |
|  |  | 1. | Melakukan pencermatan Rencana Pendapatan Asli Desa; |
|  |  | 2. | Melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk keDesa; |
|  |  | 3. | Melakukan pencermatan ualang dokumen RPJMDesa; |
|  |  | 4. | Melakukan evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun 2016; |
|  |  | 5. | Melakukan analisa keadaan darurat; |
|  |  | 6. | Melakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan atau dengan pihak ketiga; |
|  |  | 7. | Menyiapkan kelengkapan Musrenbang; |
|  |  | 8. | Menyusun jadwal kegiatan; |
|  |  | 9. | Menyusun tata tertib / ketentuan Musrenbang; |
|  |  | 10. | Melakukan identifikasi calon peserta Musrenbang; |
|  |  | 11. | Mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan Musrenbang; |
|  |  | 12. | Mengundang peserta dan narasumber minimal tiga hari sebelum hari pelaksanaan Musrenbang dilampiri hasil lokakarya Desa; |
|  |  | 13. | Memandu dan memfasilitasi penyusunan RKPDesa; |
|  |  | 14. | Memandu dan memfasilitasi lokakarya / pertemuan / rapat /dsb dalamrangka penyusunan daftar usulan RKPDesa yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; |
|  |  | 15. | Memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang; |
|  |  | 16. | Pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa; |
|  |  | 17. | Penyusunan rancangan RKPDesa; |
|  |  | 18. | Penyusunan rancangan daftar usulan RKPDesa; |
|  |  | 19. | Merumuskan hasil Musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapanya, serta; |
|  |  | 20. | Mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca Musrenbang. |
|  |  |  |  |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Kepala Desa; |
|  |  |  |
| KEEMPAT | : | Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |  |

Ditetapkan di DesaWonogiri

Padatanggal 19 September 2016

Kepala Desa Wonogiri

MUH SILACHUDIN

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Magelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. Camat Kajoran;
4. Ketua BPD Wonogiri;
5. Pertinggal.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI |
| NOMOR | : | 180.192/007/KEP/2001/2016 |
| TENTANG | : | PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RKPDesa |
| TAHUN | : | 2016 |

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKPDesa

DESA WONOGIRI TAHUN 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MUH SILACHUDIN | WONOGIRI | Pj. KEPALA DESA | PEMBINA |
| 2 | MUH SILACHUDIN | WONOGIRI | SEKRETARIS DESA | KETUA |
| 3 | NURIL IMRON | WONOGIRI | KASI PEM. & PEMB. | SEKRETARIS |
| 4 | NUR HIDAYATI | WONOGIRI | PKK | ANGGOTA |
| 5 | NUR CHARIRI | WONOGIRI | KPMD | ANGGOTA |
| 6 | M DWI HARWANTO | WONOGIRI | LPP | ANGGOTA |
| 7 | NUR FADLILAH | WONOGIRI | KADER POSYANDU | ANGGOTA |
| 8 | NUNING NURUS S | WONOGIRI | KADER POSYANDU | ANGGOTA |
| 9 | MAT TANGIDIN | WONOGIRI | LPP | ANGGOTA |

KEPALA DESA WONOGIRI

MUH SILACHUDIN



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

# NOMOR : 180.192/002/KEP/2001/2016

# TENTANG

PENGANGKATAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA WONOGIRI

TAHUN 2016

## KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwadalammelaksanakanamanatPermendagriNomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan DesaperludiangkatTim PenyusunRKPDesa; |
|  |  | b. | bahwauntukmaksudtersebutdi atasperluditetapkandenganKeputusanKepalaDesa; |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional; |
|  |  | 2. | Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah; |
|  |  | 3. | Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan; |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  | 5. | Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah; |
|  |  | 6. | PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah; |
|  |  | 7. | PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah; |
|  |  | 8. | PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; |
|  |  | 9. | PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah; |
|  |  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesasebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; |
|  |  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimantelahdiubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintahNomor8Tahun 2016tentangPerubahankedua atas PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara; |
|  |  | 12. | PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah; |
|  |  | 13. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah; |
|  |  | 14. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa; |
|  |  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
|  |  | 16. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; |
|  |  | 17. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; |
|  |  | 18. | Peraturan Daerah KabupatenMagelangNomor 5 Tahun 2008 tentangPenanggulanganKemiskinan; |
|  |  | 19. | Peraturan Daerah KabupatenMagelangNomor 28 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) KabupatenMagelangTahun 2005-2025; |
|  |  | 20. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor7Tahun 2014tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenMagelangTahun 2014 – 2019. |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN |
|  |
|  |  |  |  |
| Menetapkan | : |  |  |
|  |  |  |  |
| PERTAMA | : | Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim RencanaKerjaPemerintahanDesa. |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Tim RencanaKerjaPemerintahanDesa dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas : |
|  |  | 1. | MelakukanpencermatanRencanaPendapatanAsliDesa; |
|  |  | 2. | MelakukanpencermatanpaguindikatifDesadanpenyelarasan program / kegiatanmasukkeDesa; |
|  |  | 3. | MelakukanpencermatanualangdokumenRPJMDesa; |
|  |  | 4. | MelakukanevaluasipelaksanaanRKPDesatahun 2016; |
|  |  | 5. | Melakukananalisakeadaandarurat; |
|  |  | 6. | MelakukanpencermatankesepakatankerjasamaantarDesadanataudenganpihakketiga; |
|  |  | 7. | MenyiapkankelengkapanMusrenbang; |
|  |  | 8. | Menyusunjadwalkegiatan; |
|  |  | 9. | Menyusuntatatertib / ketentuanMusrenbang; |
|  |  | 10. | MelakukanidentifikasicalonpesertaMusrenbang; |
|  |  | 11. | MengumumkanwaktudantempatpenyelenggaraanMusrenbang; |
|  |  | 12. | Mengundangpesertadannarasumber minimal tigaharisebelumharipelaksanaanMusrenbangdilampirihasillokakaryaDesa; |
|  |  | 13. | MemandudanmemfasilitasipenyusunanRKPDesa; |
|  |  | 14. | Memandudanmemfasilitasilokakarya / pertemuan / rapat /dsbdalamrangkapenyusunandaftarusulanRKPDesa yang akandiusulkankeMusrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; |
|  |  | 15. | MemandudanmemfasilitasipenyelenggaraanMusrenbang; |
|  |  | 16. | PembahasandaftarusulanpelaksanakegiatanpembangunanDesa; |
|  |  | 17. | PenyusunanrancanganRKPDesa; |
|  |  | 18. | PenyusunanrancangandaftarusulanRKPDesa; |
|  |  | 19. | MerumuskanhasilMusrenbangdalambentukBeritaAcaradankelengkapanya, serta; |
|  |  | 20. | Mendokumentasikanseluruh proses mulaidaripersiapansampaidenganpascaMusrenbang. |
|  |  |  |  |
| KETIGA | : | DalammelaksanakantugasnyaTim PenyusunRKPDesasebagaimanadimaksudpadadiktum PERTAMA bertanggungjawabkepadaKepalaDesa; |
|  |  |  |
| KEEMPAT | : | Semuabiaya yang timbulakibatditetapkannyaKeputusaninidibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran 2016; |
|  |  |  |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |  |

Ditetapkan di DesaWonogiri

Padatanggal 05 Januari 2016

KepalaDesaWonogiri

MUH SILACHUDIN

Tembusan:

1. KepalaBappedaKabupatenMagelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. CamatKajoran;
4. Ketua BPD Wonogiri;
5. Pertinggal.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI |
| NOMOR | : | 180.192/002/KEP/2001/2016 |
| TENTANG | : | PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RKPDesa |
| TAHUN | : | 2016 |

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKPDesa

DESA WONOGIRI TAHUN 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MUH SILACHUDIN | WONOGIRI | Pj. KEPALA DESA | PEMBINA |
| 2 | MUH SILACHUDIN | WONOGIRI | SEKRETARIS DESA | KETUA |
| 3 | NURIL IMRON | WONOGIRI | KASI PEM. & PEMB. | SEKRETARIS |
| 4 | NUR HIDAYATI | WONOGIRI | PKK | ANGGOTA |
| 5 | NUR CHARIRI | WONOGIRI | KPMD | ANGGOTA |
| 6 | M DWI HARWANTO | WONOGIRI | LPP | ANGGOTA |
| 7 | NUR FADLILAH | WONOGIRI | KADER POSYANDU | ANGGOTA |
| 8 | NUNING NURUS S | WONOGIRI | KADER POSYANDU | ANGGOTA |
| 9 | MAT TANGIDIN | WONOGIRI | LPP | ANGGOTA |

KEPALA DESA WONOGIRI

MUH SILACHUDIN